

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis yang telah dilakukan mengenai manajemen pengembangan objek wisata Goa Nganten di Kecamatan Rengel dengan menggunakan pisau analisis fungsi manajemen POCCC (Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling) Henry Fayol, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan esensial sebagai berikut:

- A. Fungsi Perencanaan (Planning): Perencanaan pengembangan Goa Nganten secara normatif telah tertuang dalam draf rencana induk (master plan) BUMDes Rengel. Namun, terdapat decoupling (pemutusan) antara dokumen perencanaan formal dengan realitas implementasi. Perencanaan target kunjungan dan pendapatan sekadar menjadi proyeksi di atas kertas tanpa adanya pijakan data empiris yang valid, akibat minimnya kajian kelayakan objek wisata serta tidak dilibatkannya aktor lokal lapangan sejak tahap awal perancangan.
- B. Fungsi Pengorganisasian (Organizing): Ditemukan adanya fenomena Dualisme Tata Kelola yang memisahkan antara struktur organisasi formal dan informal. Secara formal, BUMDes Rengel memegang otoritas legal-administratif tertinggi, namun bergerak secara pasif. Sebaliknya, peran pengorganisasian operasional riil di lapangan, khususnya dalam pengelolaan program Open Trip, digerakkan secara aktif dan mandiri oleh aktor informal yaitu Komunitas Jejak

Lestari Rengel. Struktur formal BUMDes gagal mendistribusikan wewenang secara proporsional kepada komunitas lokal.

- C. Fungsi Pengarahan (Commanding): Fungsi pengarahan dari pihak manajemen formal mengalami penyempitan makna (reduksi). Instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh BUMDes hanya berorientasi pada aspek komersialisasi hulu, seperti retribusi tiket masuk dan kebersihan gerbang utama. Aspek hilir pariwisata yang krusial, seperti mitigasi risiko dan pengarahan keselamatan (safety briefing) bagi wisatawan pada jalur treking yang ekstrem, justru mengalami kekosongan instruksi formal dan diambil alih sepenuhnya oleh inisiatif komunitas.
- D. Fungsi Koordinasi (Coordinating): Saluran koordinasi antar-aktor (BUMDes, Pemerintah Desa, dan Komunitas) berjalan secara tidak berimbang (asimetris) dan cenderung mengalami stagnasi. Komunikasi vertikal dari tingkat bawah (komunitas pemuda) yang mengusulkan perbaikan sarana keselamatan dan infrastruktur fisik sering kali diabaikan atau terhambat oleh rigiditas birokrasi Pemerintah Desa dan BUMDes. Tidak adanya forum koordinasi berkala yang sah menyebabkan terjadinya disintegrasi pemahaman dalam arah pengembangan objek wisata.
- E. Fungsi Pengendalian (Controlling): Pengawasan makro yang dilakukan oleh BUMDes bersifat kosmetik dan formalitas birokrasi semata. Klaim kerapian arsip akhir tahun bertolak belakang dengan fakta bahwa pencatatan kas finansial harian serta sirkulasi wisatawan masih menggunakan buku tulis

bergaris konvensional secara manual, tanpa format akuntansi baku dan tanpa digitalisasi. Kendali mutu operasional yang efektif justru berjalan di tingkat mikro melalui kedisiplinan Komunitas Jejak Lestari yang menerapkan penegakan ketat prosedur keselamatan kerja (K3) serta inspeksi mandiri kelayakan alat rappelling.

Sintesis Utama: Manajemen pengembangan objek wisata Goa Nganten di Rengel saat ini belum berjalan secara ideal sesuai prinsip POCCC. Terdapat kesenjangan mendasar di mana instansi formal (BUMDes/Pemdes) menguasai legalitas hukum tetapi minim kompetensi administrasi pariwisata dan pasif di lapangan, sementara komunitas pemuda lokal memiliki kapabilitas operasional yang adaptif dan komitmen tinggi terhadap keselamatan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.

B. SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran strategis, taktis, dan aplikatif yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait:

1. Bagi Pemerintah Desa Rengel (Lembaga Regulator)

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Legal-Formal: Pemerintah Desa harus segera memediasi dan menerbitkan payung hukum formal berupa PKS antara BUMDes Rengel dengan Komunitas Jejak Lestari. Regulasi ini penting untuk memberikan legalitas bagi komunitas dalam mengelola lapangan, sekaligus mengatur skema pembagian pendapatan (revenue sharing) yang adil dan transparan.

Alokasi Dana Desa untuk Infrastruktur Keselamatan: Pemerintah Desa disarankan untuk meninjau kembali prioritas pembangunan dengan mengalokasikan anggaran khusus (Dana Desa) untuk pembenahan infrastruktur fisik Goa Nganten yang mendesak, seperti pemasangan tali tamper pengaman, perbaikan jalur treking yang licin/curam, serta pengadaan papan penunjuk arah mitigasi bencana di dalam goa.

2. Bagi BUMDes Rengel (Pengelola Formal)

Transformasi dan Digitalisasi Administrasi Kualitatif: BUMDes wajib menghentikan sistem pencatatan manual pada buku tulis konvensional dan beralih ke sistem pembukuan keuangan berbasis standar akuntansi sederhana (digitalisasi menggunakan software kasir atau spreadsheet terintegrasi). Penomoran karcis masuk juga harus dibuat runtut dan sistematis demi transparansi controlling keuangan.

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Wisata: Mengadakan pelatihan tata kelola destinasi wisata (Destination Management) secara profesional bagi internal pengurus BUMDes, dengan menggandeng Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata daerah agar orientasi pengelolaan tidak semata-mata mengejar retribusi, melainkan juga kenyamanan dan keamanan wisatawan.

3. Bagi Komunitas Jejak Lestari Rengel (Pengelola Lapangan)

Institusionalisasi Internal dan Standardisasi K3: Komunitas diharapkan dapat melembagakan struktur internal mereka secara lebih profesional, misalnya dengan mendaftarkan komunitas sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) resmi ke dinas

terkait. Standardisasi prosedur keselamatan Open Trip yang selama ini sudah berjalan baik harus dipertahankan dan didokumentasikan tertulis sebagai draf SOP usulan kepada BUMDes.

Advokasi Data Kunjungan yang Konsisten: Komunitas perlu mengarsipkan secara mandiri data wisatawan Open Trip (profil pengunjung, asal daerah, tingkat kepuasan) sebagai instrumen daya tawar (bargaining power) berbasis data objektif saat melakukan forum koordinasi atau negosiasi program dengan BUMDes dan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsa, A., Verawati, D. M., & Hutajulu, D. M. (2024). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Magelang Sustainable Tourism Village Development Strategy in Magelang Regency*. 5(02), 221–236.
- Anto, R. P. (2022). *Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran*. 1(4), 217–229.
- Anto, R. P., Sahil, L. O., Rahmatyah, S., Eviyant, & Togala, R. (2022). *MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KONAWE*. 2(10), 3493–3502.
- Deva, Ekwarso, H., & Taryono. (2025). *Keberadaan Objek Wisata Sungai Gelombang Dalam Pengembangan UMKM Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar*. 11(April), 210–220.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the Science of Administration*.
- Kasus, S., Daya, K., Kadur, K., Pamekasan, K., & Ababil, A. A. (2022). *Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kehi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa*. 24(2).
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nawawi, H. (2000). *Metode Penelitian Bidang Sosial*.
- Pendit, N. S. (1994). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*.
- Setiawan, A., Wulandari, W., Munawaroh, S., Jenderal, U., Yani, A., Terusan, J., Sudirman, J., Barat, J., & Cimahi, K. (2024). *Kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di desa cimanggu kecamatan ngamprah kabupaten bandung barat*. 7(1), 15–27.
- Setyaningtyas, P. O., Kismartini, & R, A. Z. (2021). *PENGEMBANGAN MANAJEMEN PARIWISATA ERA NEW NORMAL DI UMBUL PENGGING KECAMATAN BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI* Pertiwi.
- Sihombing, N. E., & Hutagalung, I. J. B. (2021). *STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN TOBA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH*. 1, 150–172.
- Spillane, J. J. (1985). *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*.

- Studia, I. (2021). *Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan*. 2, 163–172.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Utami, E. Y., Pratiwi, N. N., & A. Ayuningtyas, R. (2018). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN WISATA PANTAI TANJUNG BELANDANG KABUPATEN KETAPANG*. 1–8.
- Yoeti, O. A. (1985). *Pengantar Ilmu Pariwisata*.